

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN GOWA**

Umniatul Izzah
NPP. 31.0849

Asdaf Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Kebijakan Publik
Email : umniizzah03@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dra. Riani Bakri, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *Gowa Regency is an area dominated by highlands, namely around 72.26%, which is one of the causes of landslides. In the 2022 Landslide Disaster Risk Index, Gowa Regency is in the high risk class for landslides. Landslides that occurred in Gowa Regency caused damage such as damaged roads which had an impact on the community's life cycle and caused casualties. Objective: The aim of this research is to find out how the Gowa Regency Regional Disaster Management Agency collaborates with stakeholders in efforts to overcome landslides in Gowa Regency. Method: This research uses the Collaborative Governance theory put forward by Ansell and Gash in 2007. The theory has 4 (four) dimensional stages, namely starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process (collaborative process). Results/Findings: The research results show that the collaboration carried out by the Gowa Regency Regional Disaster Management Agency is still not optimal. There are still several things that are obstacles in carrying out this collaboration, namely the lack of facilities and infrastructure as well as human resources. Conclusion: The things that are suggestions and input so that collaboration can run better in the future are increasing human resources and completing the infrastructure used in dealing with landslides, both in the prevention, emergency response and post-disaster stages.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Gowa merupakan daerah yang didominasi oleh dataran tinggi yakni sekitar 72,26% yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tanah longsor. Dalam Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor Tahun 2022, Kabupaten Gowa berada pada kelas risiko tinggi untuk kejadian tanah longsor. Tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Gowa menyebabkan kerusakan seperti jalan rusak yang berdampak pada siklus kehidupan masyarakat hingga menyebabkan korban jiwa. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa melakukan kolaborasi bersama para *stakeholder* dalam upaya

penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash pada tahun 2007. Teori yang memiliki 4 (empat) tahap dimensi yaitu kondisi awal (*starting condition*), desain institusional (*desain institusional*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaborasi (*collaborative process*). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa masih belum optimal. Masih ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam menjalankan kolaborasi tersebut yakni masih kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya. **Kesimpulan:** Adapun hal yang menjadi saran serta masukan agar kolaborasi dapat berjalan lebih baik kedepannya yaitu penambahan sumber daya manusia dan melengkapi sarana prasarana yang digunakan dalam penanggulangan bencana tanah longsor baik dalam tahap pencegahan, tanggap darurat dan pasca bencana.

Kata kunci : kolaborasi, penanggulangan, tanah longsor.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia yang berada pada jalur cincin api Pasifik (*ring of fire*), menjadi penyebab banyaknya potensi bencana alam. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam mengatur sistem kebencanaan yang ada di Indonesia dengan baik. Bencana meliputi bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial. Meskipun sebagian bencana mampu diprediksi sebelum terjadi seperti kapan kemunculan dan intensitasnya, namun sebagian besar kejadiannya sangat tiba-tiba dan tak bisa diduga sebelumnya.

Dalam mengatasi dan memetakan bencana di Indonesia, terdapat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki peran sentral dan bertanggung jawab dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem pemetaan bencana yang komprehensif. BNPB memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait, memfasilitasi perencanaan mitigasi bencana yang efektif, serta memberikan respons cepat dalam situasi darurat bencana, mulai dari banjir, gempa bumi, kebakaran, kekeringan, puting beliung, letusan gunung berapi dan utamanya tanah longsor (BNPB, 2022).

Di Indonesia sendiri, bencana alam sangat sering terjadi dan mengancam nyawa serta mengganggu jalannya kehidupan masyarakat, salah satunya ialah bencana tanah longsor. Tanah longsor dapat dikatakan sebagai masalah serius bagi daerah yang memiliki banyak dataran tinggi baik gunung ataupun bukit. Bencana ini merupakan salah satu dari beberapa jenis bencana alam yang sering timbul di Indonesia selain banjir, gempa bumi, angin topan, kekeringan, dan lain-lain. Melalui data yang dipublikasikan di website Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, total bencana tanah longsor yang terjadi tiap tahunnya terus meningkat. Meskipun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan, akan tetapi bencana tanah longsor jika ditotalkan dalam lima tahun terakhir yakni dari tahun 2018 hingga 2022 memiliki jumlah yang mencapai angka 4.459 jumlah bencana yang bisa dikatakan sangat tinggi dan menyebabkan banyak korban jiwa.

Bencana tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah juga menunjukkan pola yang sejalan dengan tren nasional bencana tanah longsor di Indonesia, salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Tahun 2021, Provinsi Sulawesi Selatan berada pada urutan ke 7 dengan kejadian tanah longsor terbanyak di Indonesia dengan 24 kejadian. Akan tetapi, meningkat menjadi urutan ke 5 pada Tahun 2022 dengan 77 kejadian. Berdasarkan pernyataan tersebut, dilakukan pengujian potensi luas dan kelas bahaya tanah longsor di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah Kabupaten Gowa termasuk ke dalam wilayah yang mempunyai beberapa daerah berpotensi longsor tinggi dan cukup berbahaya.

Tanah longsor di Kabupaten Gowa merupakan ancaman serius yang membutuhkan penanganan cepat dan efektif. Penanganan ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Kerjasama yang dilakukan berbagai pihak memiliki keuntungan seperti peningkatan kolektif untuk menangani bencana, berbagi sumber daya dan informasi, serta peningkatan legitimasi keputusan yang diambil. Oleh karena itu, penerapan *collaborative governance* sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Wilayah Kabupaten Gowa termasuk ke dalam wilayah yang mempunyai beberapa daerah berpotensi longsor tinggi dan cukup berbahaya. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Gowa memiliki sifat geologi yang kompleks, kemiringan lereng bervariasi, serta curah hujan yang juga bervariasi dari rendah hingga sangat tinggi.

Tabel 1.1

Luas Daerah Rawan Longsor (Ha) Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Luas Bahaya (Ha)			Total	Kategori
		Kelas				
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Luwu Utara	14.002	280.978	94.766	489.746	Tinggi
2	Luwu Timur	166.009	150.577	44.956	361.542	Tinggi
3	Luwu	38.637	108.569	62.449	209.655	Tinggi
4	Tana Toraja	9.478	100.068	67.149	176.695	Tinggi
5	Enrekang	22.725	69.003	50.769	142.497	Tinggi
6	Bone	60.053	50.715	17.100	127.686	Tinggi
7	Gowa	37.996	42.044	16.623	96.663	Tinggi
8	Toraja Utara	5.340	70.278	14.994	90.612	Tinggi
9	Barru	26.704	31.689	16.174	74.567	Tinggi
10	Pinrang	16.952	29.807	31.609	78.368	Tinggi
11	Maros	36.284	20.101	9.885	66.270	Tinggi
12	Sidenreng Rappang	21.528	30.003	13.239	64.770	Sedang
13	Soppeng	2.313	35.186	11.726	49.225	Sedang
14	Sinjai	14.956	15.750	5.689	36.395	Tinggi
15	Kepulauan Selayar	20.184	9.682	1.414	31.280	Sedang
16	Pangkajene Kepulauan	12.836	10.515	5.465	28.816	Tinggi
17	Palopo	1.201	9.633	6.052	16.886	Tinggi
18	Jeneponto	6.662	4.832	2.605	14.099	Tinggi
19	Bantaeng	5.312	5.259	2.546	13.117	Tinggi

20	Wajo	10.846	1.541	170	12.557	Rendah
21	Bulukumba	3.041	3.820	2.370	9.231	Tinggi
22	Takalar	3.882	2.675	35	6.592	Sedang
23	Pare Pare	215	2.752	520	3.487	Sedang
24	Makassar	-	-	-	-	-
Provinsi Sulawesi Selatan		537.156	1.185.477	478.305	2.200.938	Tinggi

Sumber: Hasil KRB Sulawesi Selatan Tahun 2022

Dari hasil pengujian potensi luas dan kelas bahaya tanah longsor di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa menempati urutan ke-tujuh dengan Luas yang termasuk dalam kategori bahaya rendah berjumlah 37.996 ha, kategori sedang berjumlah 42.044 ha, dan kategori tinggi berjumlah 16.623 ha. Pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2022, terdapat 8 kejadian tanah longsor dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yakni Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 Adapun rekapitulasi data kerusakan dan korban jiwa akibat dari bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa Tahun 2019 – Tahun 2022 yaitu 56 orang meninggal, 21 orang hilang, dan 639 orang luka berat dan ringan.

Selain itu, tujuan utama pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa adalah untuk mempercepat penanganan saat terjadi bencana sehingga kejadian bencana tanah longsor tersebut tidak terlalu berdampak pada siklus kehidupan masyarakat Kabupaten Gowa. Terganggunya siklus masyarakat akan berdampak terkhusus pada perekonomian mengingat Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten dengan penyatok sayuran terbesar di Sulawesi Selatan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan mengenai *collaborative governance* dan bencana tanah longsor. Penelitian Putri Pasaribu, Nurliana Cipta Apsari dan Sri Sulastris yang berjudul Kolaborasi Penta Helix Dalam Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi, menemukan bahwa kolaborasi Penta Helix sangat berpengaruh dalam penanganan bencana di Indonesia karena dalam kolaborasi ini memberikan peluang bagi semua pihak yang terkait menjadi aktor dalam menanggulangi bencana (Putri Pasaribu, Nurliana Cipta Apsari, dan Sri Sulastris, 2023). Kemudian penelitian Hendra Irawan Umabaihi, Nurliah Nurdin dan Romli Arsyad yang berjudul *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula, mengemukakan bahwa proses kolaborasi belum bisa terlaksana dengan baik terlihat dari belum terlibatnya pemangku kepentingan/aktor yang lain dalam berkolaborasi, yakni Akademisi atau perguruan tinggi. Selain itu juga kurangnya sumber daya dari sisi anggaran maupun peralatan menjadikan penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal (Hendra Irawan Umabaihi, Nurliah Nurdin, dan Romli Arsyad, 2022). Selanjutnya penelitian Bela Safira, Alfi Rahman, dan Wais Alqarni yang berjudul *Collaborative Governance* Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Aceh

membahas tentang bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh yang ditinjau melalui pendekatan *Collaborative Governance* dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi saat melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini mengemukakan bahwa pada indikator initial condition sudah terlihat. Pada indikator *contingencies and constraints, outcomes and accountabilities, structure and governance, process components* masih mengalami hambatan pada beberapa elemen pendukung pada indikator tersebut (Bela Safira, Alfi Rahman, dan Wais Alqarni, 2023). Adapun penelitian Muhammad Farhan Selian berjudul *Optimalisasi Pasca Bencana Tanah Longsor Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekontruksi Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh* mengemukakan bahwa *Optimalisasi Pendataan kerusakan infrastruktur yang rusak akibat bencana belum tercapai, sehingga pemerintah daerah diharuskan melakukan koordinasi bersama masyarakat terkait masalah kejelasan data yang diperoleh agar sesuai dengan semestinya. Kendala yang paling utama yakni banyak masyarakat yang tidak berada pada lokasi sehingga pada saat pendataan dilakukan, hasilnya hanya apa adanya (Muhammad Farhan Selian, 2023).* Penelitian Favian Yafi' Naufal dengan judul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tanah Longsor Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur* mengemukakan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana tanah longsor di Kota Malang belum optimal, terlihat dari tidak semua fasilitas yang rusak akibat tanah longsor di lakukan rehabilitasi serta rekonstruksi. Hal ini disebabkan karena beberapa kendala antara lain anggaran yang kurang tersedia, jumlah pegawai yang kurang, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana (Favian Yafi' Naufal, 2022). Ichwan Nurutdin melakukan penelitian berjudul *Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan Dalam Prespektif Collaborative Governance* memiliki tujuan untuk mendeskripsikan upaya penanggulangan pra bencana alam tsunami sebelum dan sesudah kejadian tsunami tahun 2018 dan mengidentifikasi upaya-upaya penanggulangan pra bencana alam tsunami tersebut ke dalam presepektif konsep *Collaborative Governance*. Selanjutnya berfokus pada penelitian yang mendeskripsikan apa saja upaya penanggulangan pra bencana yang sudah dilakukan sebelum dan sesudah kejadian tsunami pada tahun 2018 serta mengidentifikasi upaya penanggulangan pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan ke dalam konsep *Collaborative Governance* (Ichwan Nurutdin, 2020). Suhindarno melakukan penelitian dengan judul *Strategi BPBD dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro. Strategi BPBD untuk melakukan program mitigasi bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro yaitu menggunakan analisis SWOT: 1. Kekuatan: Adanya hubungan kerjasama dengan instansi atau Organisasi terkait. 2. Kelemahan: Terbatasnya SDM, Kurang dalam hal bekerja sama. 3. Peluang: Meningkatnya kepedulian lingkungan di masyarakat, adanya sosialisasi tentang kebencanaan 4. Ancaman: Tuntutan Masyarakat yang semakin banyak dalam hal pelayanan, kepercayaan masyarakat menurun, dan curah hujan yang tidak menentu (Suhindarno, 2021).*

1.4. Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penulis membahas tentang *Collaborative Governance* dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor dengan lokus yang digunakan adalah Kabupaten Gowa. Pada penelitian sebelumnya yang telah dibahas terdapat persamaan dalam metode penelitian yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif dan persamaan lainnya dapat dilihat dari dinas atau badan pelaksana yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai daerah masing-masing. Perbedaan penelitian yang dilakukan yakni pada teori yang digunakan dimana penulis menggunakan teori Ansell dan Gash (2007) yang mengemukakan bahwa *Collaborative Governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik (Ansell & Gash, 2007).

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *Collaborative Governance* Kabupaten Gowa melalui BPBD dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif Menurut pendapat dari Siyoto dan Sodik (2015:121) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan suatu metode yang kita mulai dari sebuah fakta yang empiris guna mendapatkan kebenaran terkait dengan kondisi dari objek yang akan diteliti serta sistem suatu penafsiran dan kaitan antara fenomena, sehingga mendapatkan kesimpulan yang umum. Oleh karenanya, dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung di lapangan, wawancara terkait permasalahan dengan pihak yang terkait langsung dengan permasalahan dan juga dokumentasi sebagai bukti nyata penelitian yang dilakukan. Adapun dalam menganalisis data menggunakan teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash (2007) yang terdiri dari 5 dimensi yakni *Starting Condition* (Kondisi Awal), *Institutional Design* (Desain Institusional), *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif), dan *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi). Kemudian penelitian ini menganalisis informasi melalui sumber data yang didapatkan di lapangan. Menurut Simangunsong (2017:230) data berdasarkan sumbernya meliputi : data primer, data sekunder, dan informan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa sesuai dengan judul penelitian yaitu *collaborative governance*

dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa. Penelitian yang dilakukan penulis memberikan hasil yang sesuai dan dirangkum dengan rumusan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut.

3.1. Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Gowa

Collaborative Governance menjadi sebuah konsep dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang mewajibkan terlibatnya seluruh pemangku kepentingan dalam bersama-sama melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana baik dalam tahap pencegahan dan mitigasi, tahap kesiapsiagaan, tahap tanggap darurat, dan tahap rehabilitasi serta rekonstruksi. BPBD Kabupaten Gowa dalam menanggulangi bencana longsor memiliki tujuan dan sasaran dalam meningkatkan cakupan penanggulangan bencana longsor. Dalam meningkatkan cakupan tersebut, maka BPBD Kabupaten Gowa berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan. Penelitian ini akan menganalisis terkait penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa dengan didasari oleh teori Ansell dan Gash (2007) tentang *Collaborative governance*. Dimana dalam penyelenggaraan *Collaborative governance* dipengaruhi oleh :

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)
2. *Institutional Design* (Desain Institusional)
3. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)
4. *Collaborative Process* (Kolaboratif Proses)

3.1.1. Starting Condition (Kondisi Awal)

Kondisi awal ini memiliki potensi sebagai pencegah atau pemicu adanya kolaborasi antara para pemangku kepentingan. Agar lebih jelas maka dalam memahami kondisi awal dapat dilihat melalui sumber daya, insentif, dan konflik pemangku kepentingan untuk berpartisipasi di dalamnya.

- a. Sumber Daya : Penyelenggaraan penanggulangan bencana membutuhkan sumber daya baik manusia maupun sarana dan prasarana. Dua hal tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kolaborasi. Para pihak yang terlibat kolaborasi membutuhkan satu sama lain dalam menutupi kekurangan baik kekurangan personil maupun kekurangan sarana dan prasarana. BPBD sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana membutuhkan bantuan dari pihak lain seperti TNI/Polri dan masyarakat untuk memenuhi kekurangan anggota atau pegawainya. Pihak swasta juga dibutuhkan dalam memenuhi kekurangan sarana dan prasarana yang akan digunakan. Oleh karena itu, kolaborasi sangat dibutuhkan dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor tersebut.
- b. Insentif : Realisasi anggaran dalam penanggulangan bencana terkhusus bencana tanah longsor yang dilakukan oleh BPBD sudah terlihat hasilnya yakni rehabilitasi dan rekonstruksi yang berjalan dengan cepat tetapi, kekurangan dari sumberdaya belum bisa tertutupi. hal tersebut dapat terlihat pada tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 dalam renstra

BPBD Kab. Gowa Tahun 2021-2026. Hal ini menjadi motivasi dan dorongan terjadinya kolaborasi agar keterbatasan dapat teratasi.

- c. Konflik : Konflik yang terjadi sebelum terlaksananya kolaborasi membuat tingkat kepercayaan rendah yang berdampak rendahnya tingkat komitmen. Adanya sejarah konflik yang baik dapat mendorong pemangku kepentingan untuk saling percaya dan saling ketergantungan sehingga dapat menghasilkan kolaborasi yang baik pula. Konflik dapat dilihat dari kendala atau keterbatasan yang timbul dalam penanggulangan bencana longsor di daerah Kabupaten Gowa.

3.1.2. Institusional Design (Desain Institusional)

Institusional atau kelembagaan adalah unsur-unsur yang secara terorganisasi saling berkaitan dalam hal ini meliputi baik dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat umum dan lembaga swadaya masyarakat. Berdasarkan model *collaborative governance* Ansel dan Gash (2007) pada dimensi desain institusional/kelembagaan meliputi partisipasi forum, aturan-aturan dasar, transparansi, dan forum terbatas.

- a. Partisipasi Forum : Aktor dalam *collaborative governance* terdiri dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam hal ini penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan yang terpengaruh dan peduli masalah ini. Para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat aktif pada kolaborasi yang dijalin dalam hal ini mengenai penanggulangan bencana longsor. Partisipasi dalam *collaborative governance* dapat dilihat dalam kerjasama yang dibangun antara pemerintah dengan pemerintah dan antara pemerintah dengan masyarakat.
- b. Aturan-aturan dasar : Penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten Gowa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2013 yang dilandasi oleh dasar dari segala peraturan yang terkait dengan bencana yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Kemudian pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Gowa. Dalam peraturan tersebut dibahas tentang tahap-tahap penanggulangan bencana sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Gowa. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa mengatur dalam Bab V yang menyatakan pembentukan forum dalam Upaya pengurangan resiko bencana dan dijelaskan pada Bab VI bahwa forum yang dibentuk mulai dari peran lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lainnya Sesuai dengan konsep *Collaborative Governance*.
- c. Transparansi : Dalam usaha untuk menunjukkan keterbukaan Pemerintah kabupaten Gowa dalam hal ini BPBD, transparansi dalam penanggulangan bencana terkhususnya tanah longsor telah dibuka secara umum dan dapat diakses dan dibaca langsung oleh masyarakat melalui laporan kinerja dan rencana strategis BPBD Kabupaten Gowa.
- d. Forum Terbatas : Hasil analisis wawancara menunjukkan bahwa pemerintah bersama dengan pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana telah memanfaatkan teknologi dengan baik dalam hal berkomunikasi untuk menjalin

kolaborasi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan aplikasi whatsapp dan media sosial lainnya. Hal ini memberikan efek positif bagi pemerintah dan masyarakat dimana kecepatan informasi tersampaikan dan transparansi kinerja penanggulangan bencana daerah Kabupaten Gowa dapat dilihat langsung oleh umum.

3.1.3. Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)

Dalam jurnalnya Ansell dan Gash (2007) mendeskripsikan bahwa kepemimpinan merupakan komponen yang membawa para pemangku kepentingan lain untuk ikut serta dalam kolaborasi yang dirancang. Kepemimpinan berguna untuk merangkul, memotivasi, memberdayakan dan menggerakkan pemangku kepentingan untuk bergerak dalam proses kolaborasi.

- a. Memahami Konteks : Kompetensi pertama yaitu pemimpin fasilitatif diharapkan dapat memahami konteks dalam hal ini yaitu penanggulangan bencana tanah longsor, pemimpin yang terutama Kepala Pelaksana BPBD dengan Camat Parangloe harus memahami penanggulangan bencana longsor yang tepat dan bagaimana kolaborasi dalam penanggulangan bencana itu berlangsung. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi Keputusan sepihak oleh satu kepentingan saja. Memperhatikan segala aspek dan menerima aspirasi yang sejalan dan sesuai dengan penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Gowa.
- b. Kompetensi Teknis : Kompetensi kedua yaitu pemimpin fasilitatif diharapkan dapat memiliki kompetensi teknis dalam hal ini penanggulangan bencana longsor secara kolaboratif. Terutama dalam kolaborasi ini, yaitu Kepala Pelaksana BPBD dengan Camat Parangloe. Penanggulangan bencana longsor secara kolaboratif bukan hanya sekedar menanggulangi bencana dengan teknik lama tapi terus mengembangkan ide dengan mengumpulkan aspirasi bersama untuk memberikan hasil yang lebih maksimal dalam menanggulangi bencana tanah longsor.
- c. Kompetensi Rasional : Kompetensi rasional merupakan objektivitas dalam penilaian dalam penanggulangan bencana longsor. Kepemimpinan fasilitatif dalam melihat penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Gowa harus objektif dalam penilaiannya. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana longsor yang termasuk kedalam pelaksana adalah para pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.
- d. Kompetensi Interpersonal : Kemampuan interpersonal kepemimpinan fasilitatif dalam hal ini Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Camat Parangloe menunjukkan kemampuan verbal dan nonverbal dalam hal berkomunikasi baik dengan pemerintah, swasta, media, dan masyarakat. Kompetensi interpersonal sangat dibutuhkan untuk kepemimpinan fasilitatif sebagai pemimpin atau ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hal ini sangat penting agar komunikasi yang terjadi antar masyarakat dan pemerintah dapat berjalan dengan baik baik melalui social media ataupun bertemu langsung.
- e. Kompetensi Proses Tugas : Kompetensi proses tugas adalah kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki oleh kepemimpinan fasilitatif pada hal ini

merupakan strategi yang dimiliki pemimpin dalam mengembangkan pemecahan masalah pada masalah ini yaitu Penanggulangan Bencana longsor di Kabupaten Gowa. Kompetensi proses tugas ini dapat dilihat dari bagaimana kepemimpinan fasilitatif dalam hal melakukan pemecahan masalah.

- f. Kompetensi Proses Manusia : Kompetensi proses manusia merupakan kemampuan kepemimpinan fasilitatif untuk membangun kepercayaan. Kepercayaan dibangun dengan adanya proses komunikasi yang dijalin antara para aktor. Adapun strategi yang dilakukan oleh Camat Parangloe dalam hal membangun kepercayaan baik antara pemerintah dengan pemerintah dan antara pemerintah dan masyarakat yaitu dengan melakukan koordinasi dan melakukan rapat. Hal ini dibuktikan dalam hal Pembentukan forum masyarakat untuk dapat membangun kepercayaan pihak pihak terkait. Pelatihan dan sosialisasi Bersama BPBD dilakukan guna memperkuat kolaborasi yang ada.
- g. Karakteristik Pribadi : Karakteristik pribadi merupakan kemampuan kemampuan untuk belajar menjaga hubungan. Kepala pelaksana BPBD Bersama dengan Camat Parangloe yang telah menciptakan forum untuk mendiskusikan penanggulangan bencana longsor dengan para pihak telah sejalan dengan Kepemimpinan fasilitatif yang baik yang merupakan kepemimpinan yang terbuka untuk menerima kritikan dari masyarakat sehingga masyarakat memiliki rasa kedekatan antara pemimpin dengan masyarakat. Berdasarkan hasil uraian diatas hubungan yang berusaha dijalin BPBD dan Camat Parangloe Bersama dengan pihak yang lain adalah hubungan yang baik yang bersifat kekeluargaan.

3.1.4. Collaborative Process (Kolaboratif Proses)

Proses kolaborasi adalah proses yang membahas mengenai dialog yang dilakukan dengan partisipasi pemangku kepentingan untuk mendapatkan keputusan bersama yang disepakati. Kolaborasi tergantung pada bagaimana siklus kolaborasi itu berputar mulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Ansell dan Gash (2007).

- a. Dialog Tatap Muka : Dialog tatap muka adalah proses tawar menawar yang terjadi antar pemangku kepentingan mengenai insentif yang dapat dicapai bersama Ansell dan Gash (2007). Dialog tatap muka yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa dengan pihak yang terlibat dilakukan dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanggulangan bencana longsor baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Membangun Kepercayaan : Dalam proses *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Gowa dalam membangun kepercayaan melalui saling menghormati peran dan kewenangan setiap pemangku kepentingan. Transparansi dalam penanggulangan bencana longsor juga menjadi faktor pendukung terutama dalam hal retribusi yang berkaitan dengan dana dan bantuan. Adapun untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana longsor dilakukan dengan sosialisasi dan forum diskusi oleh Camat Parangloe yang dilakukann Bersama Masyarakat. Keterbukaan yang dilakukan oleh BPBD berkaitan dengan anggaran dan penyaluran dana untuk menjaga kepercayaan Masyarakat dan berbagai pihak

telah terlaksana dengan baik seperti yang telah disampaikan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti.

- c. **Komitmen Terhadap Proses** : Komitmen berkaitan erat dengan motivasi awal untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi. Dalam pengambilan Keputusan untuk merencanakan tahap tahap baik dalam pencegahan, tanggap darurat bencana dan evaluasi bencana longsor yang terjadi BPBD selalu melibatkan seluruh pihak yang terkait untuk mendiskusikan dan menginformasikan terkait tindakan dan kegiatan yang dilakukan. Komitmen terhadap proses dalam hal penanggulangan bencana dapat berubah sewaktu-waktu hal ini mengikut dengan perubahan yang ada dilapangan. Hal ini sering terjadi pada masa Tanggap Darurat Bencana longsor.
- d. **Pemahaman Bersama** : Pada titik tertentu dalam proses kolaboratif, pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama apa yang mereka dapat capai bersama (Ansel dan Gash, 2007:560). Permasalahan yang masih ada di Kabupaten Gowa dalam hal penanggulangan bencana longsor yaitu jarak tempuh ke wilayah dataran tinggi Kabupaten Gowa dan diungkapkan dalam Renstra Kabupaten Gowa 2021-2026 bahwa masih kurangnya sarana prasarana yang memadai. Maka dari itu, BPBD bersama dengan berbagai pihak yang terlibat dan merundingkan bersama terkait dengan solusi atas permasalahan tersebut.
- e. **Hasil Sementara** : Kolaborasi akan terjadi jika setiap pemangku kepentingan memiliki tujuan baik berupa keuntungan dalam penyelenggaraan kolaborasi. Hasil sementara adalah tujuan jangka pendek yang ingin diraih, dalam hal penanggulangan bencana longsor. Sejauh ini berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu koordinasi yang lebih baik, pengetahuan lokal, sumber daya yang lebih luas, dan keterlibatan masyarakat.

3.2. Faktor Pendukung Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Gowa

Dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor di suatu daerah akan terlaksana dengan baik apabila terdapat faktor yang mendukung proses penanggulangan bencana tersebut. Sama halnya di Kabupaten Gowa, upaya penanggulangan bencana tanah longsor dapat terlaksana dengan baik dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mendukung upaya tersebut, yakni :

- Tersedianya regulasi yang jelas dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa.
- Dukungan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan tugas menjadi motivasi terjalannya koordinasi antar pemangku kepentingan serta memudahkan komunikasi dengan pemerintah pusat.
- Terbentuknya Tim Reaksi Cepat yang menjadi garda terdepan pada tahapan awal penanggulangan bencana.
- Tingginya kerjasama dan semangat kerja, solidaritas dan rasa tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan tugas utama penanggulangan bencana.

3.3. Faktor Penghambat dan upaya mengatasi faktor penghambat Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Gowa

Dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa masih ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan upaya penanggulangan tersebut. Adapun faktor penghambat yang ditemukan penulis yakni :

- Masih rendahnya penerapan SOP dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- Masih adanya personil yang kurang terlatih dan tersertifikasi.

Adapun upaya yang harus dilakukan agar mengatasi faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan yaitu :

- Melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung dalam penanggulangan bencana terkhusus pada bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa.
- Mengusulkan penambahan pegawai di BPBD Kabupaten Gowa. Hal ini berguna dalam mengoptimalkan tugas dan wewenang yang ada.
- Melaksanakan pelatihan dan serifikasi bagi pegawai BPBD agar membantu meningkatkan kompetensi, standarisasi pengetahuan, efektivitas respons, pengurangan risiko bencana, dan kepercayaan masyarakat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan upaya penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa dengan metode *collaborative governance* memberikan dampak yang baik. Kolaborasi yang dilakukan berbagai pihak yakni pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat masing-masing memainkan peran krusial dalam mengatasi tantangan bencana alam yang kompleks dan dinamis. Kolaborasi yang dilakukan juga membuat setiap pemangku kepentingan dapat berbagai pengetahuan, sumber daya, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pelaksanaan kolaborasi yang terstruktur dan terencana yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat memberikan banyak manfaat dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa. BPBD Kabuapten Gowa mengambil peran sebagai fasilitator dan koordinator, sementara masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan program-program yang dibuat.

Hasil dari penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana upaya peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman tanah longsor. Melalui berbagai pelatihan dan edukasi yang diselenggarakan bersama, masyarakat lebih paham terkait bagaimana bertindak pada saat terjadi bencana dan pasca terjadi bencana. Selain itu teknologi dan informasi yang tepat seperti sistem peringatan dini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memonitor kondisi secara *real-time* sehingga perencanaan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dapat tersusun dengan baik. Regulasi dan kebijakan sangat penting dalam pelaksanaan *collaborative governance* karna kebijakan yang jelas dan tegas dari pemerintah daerah memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk mengimplementasikan upaya dan strategi yang dibuat. Kebijakan ini dikombinasikan dengan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi yang efektif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* merupakan pendekatan yang efektif dalam penanggulangan bencana tanah longsor di

Kabupaten Gowa. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dapat tercipta sinergi yang kuat dalam menghadapi ancaman bencana. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan dan respon bencana, tetapi juga membangun ketahanan masyarakat secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa *Collaborative Governance* dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa yang dilaksanakan belum optimal. Hal ini didasarkan pada : Kondisi Awal, penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Gowa jika melihat dari indikator, sumber daya yang dimiliki masih kurang baik dari segi SDM dan sarana prasarana. Pemahaman masyarakat di daerah rawan bencana longsor belum merata. Adapun lokasi dan akses jalan menuju daerah terdampak sulit untuk ditempuh bagi pihak yang terlibat. Kemudian Desain Institusional, dari 4 indikator dari dimensi, 1 indikator yaitu aturan yang belum terpenuhi dengan baik dalam kolaborasi penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Gowa. Beberapa bagian dari pihak seperti tenaga operasional di BPBD masih belum bisa melaksanakan penanggulangan yang sesuai dengan SOP yang berlaku. Akan tetapi, untuk dimensi lainnya yakni kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi telah terpenuhi dan sesuai dengan hasil yang didapatkan dalam penelitian yang dilakukan.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini yakni waktu dan data penelitian. Selain itu, lokus bencana pada penelitian ini memiliki akses jalan yang sulit dilalui oleh penulis.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Temuan pada penelitian ini masih berada pada tahap awal, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan lokus yang sama bahkan lebih luas agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- bnpbl, C., & Gash, A. 2008. *Collaborative Governance* in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol.18(4): 543-571.
- BNPB. 2022. IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) Tahun 2022. Bnpb, 01, 1–338.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Gowa 2023*. Kabupaten Gowa.
- Simangunsong, F. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

- Suhindarno, H. (2021). Strategi BPBD Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Bojonegoro . *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 5(2), 22-27.
- Pasaribu, L. P. (2023). Kolaborasi Penta Helix Dalam Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi Di Palu-Sulawesi Tengah.
- Nurdin, N., & Arsyad, R. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 4(6), 10286-10300.
- Safira, B., Rahman, A., & Alqarni, W. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(1).
- Selian, M. F. (2023). Optimalisasi Pasca Bencana Tanah Longsor Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Doctoral Dissertation, Ipdn).
- Naufal, F. Y. (2022). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tanah Longsor Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12.
- Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 25, tanggal 11 Juli 2011).
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Gowa